

## 6. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Hasil dan pembahasan penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pembangunan Kabupaten Subang yang dilaporkan terus meningkat, namun juga disertai angka kemiskinan penduduk yang meningkat. Di lokasi penelitian 80% penduduknya dalam kemiskinan multidimensi, 36% diantaranya kronis. Kedalaman kemiskinan mencapai 0.20 hingga 0.23 dengan keparahan antara 2.89 hingga 4.67.
2. Kondisi aset kapital di kedua desa lokasi penelitian berada di bawah nilai 50% dari maksimal. Pengelolaan sumberdaya di Patimban menyebabkan kerusakan sumberdaya alam (*natural asset*), akibatnya rawan terhadap bencana dan ikan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya (*miskin*). Sementara pengelolaan di Pangarengan yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana (*man-made*) menjadikan sumberdaya alam tidak memiliki nilai tambah yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat (*miskin-terisolir*).
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang cenderung pada pendekatan sektoral, sementara komitmen yang *pro coastal* dan *pro poor* kurang terlihat. Pemilihan/prioritas program dan sasaran pembangunan terfokus pada usaha mendongkrak PAD, sementara perhatian terhadap kelompok miskin terbatas pada harapan dapat terbantu dari perkembangan kelompok produktif yang prospektif (sebagai *trickle down effect*).
4. Pekerjaan yang menjadi matapecaharian penduduk adalah perikanan, pertanian dan informal (ojek, pembantu rumahtangga, ngamen, kuli bangunan, PSK). Preferensi generasi muda mengarah kepada sektor industri termasuk pariwisata (hiburan), sementara preferensi terhadap sektor perikanan dan pertanian rendah. Realitas ini perlu perhatian khusus, karena hilangnya keterikatan mereka terhadap pekerjaan yang tergantung pada sumberdaya alam berarti juga hilangnya perhatian dan empaty untuk mengelola dan menyelamatkan sumberdaya alam tersebut. Sementara pengelolaan sektor perikanan yang baik dan terpadu dapat memberikan hasil yang baik sebagaimana di daerah lain (Blanakan). Pengelolaan sumberdaya alam pesisir memerlukan partisipasi masyarakat demi menjamin ketersediaan gizi masyarakat (dari ikan yang berprotein tinggi). Perikanan tangkap juga dapat berperan sebagai lokomotif perekonomian daerah, yang nantinya diharapkan turut menanggulangi kemiskinan mereka secara berkelanjutan. Tanpa ekosistem mangrove yang berkelanjutan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Subang semakin menurun.

## 6.2. Saran

1. Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Subang yang akan datang seyogyanya *pro-coastal* dan *pro-poor*, dengan pendekatan yang terpadu. Pengelolaan sumberdaya pesisir dengan manajemen ekowisata sebagai sintesa matapencaharian industri pariwisata, pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan perlu dipertimbangkan untuk keberlanjutan proses pembangunan daerah.
2. Perhatian *NAC* diperlukan untuk pengembalian fungsi ekologis ekosistem di Patimban melalui penanaman mangrove sepanjang pantai yaitu 10 km dengan lebar minimal 100 m dari Dusun Trungtum.
3. Kebijakan asuransi pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga diperlukan untuk meningkatkan status *HAC* baik di Patimban maupun di Pangarengan.
4. Pengembangan lapangan kerja yang ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah dan ekowisata dapat membangkitkan usaha ekonomi keluarga masyarakat lokal, meningkatkan status *SAC* dan juga bermanfaat untuk melindungi pantai dari hantaman ombak (abrasi) dan menyediakan habitat bagi pengembangan biota laut (ikan).
5. Dukungan anggaran Pemerintah Daerah yang jelas dalam waktu minimal 10 tahun diperlukan untuk mendukung prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, dan gerakan menabung bagi seluruh warga untuk penguatan manajemen keuangan keluarga yang realistis, sehat dan mandiri.
6. Pembangunan akses sarana dan prasarana jalan raya sepanjang 15 km dan jembatan yang memadai di Pangarengan perlu dijadikan prioritas kegiatan.